

Analisis kebijakan anggaran kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat tahun 2009 = Policy analysis of the health budget allocated at the health authority office of Lahat district of the year 2009

Herwansyah Alam

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20338684&lokasi=lokal>

Abstrak

Pembangunan sektor kesehatan terlihat belum merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Lahat, hal ini dapat dilihat dari rendahnya anggaran kesehatan yang dialokasikan pada dinas kesehatan selama empat tahun terakhir: tahun 2005 - 2008, berkisar antara 3,86% - 4,98% dari total APBD. Kebijakan pengalokasian anggaran kesehatan yang relatif masih rendah ini tentunya dapat berdampak dengan masih rendahnya status kesehatan masyarakat, ini terlihat dari beberapa indikator kesehatan yaitu masih tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Lahat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penganggaran kesehatan beserta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya anggaran kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat tahun 2009.

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan telaah dokumen pada Dinas Kesehatan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lahat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan, namun proporsi alokasi anggaran tidak menggambarkan sebagai prioritas. Proses perencanaan penganggaran kesehatan tergantung pada pagu anggaran yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah sangat besar namun demikian tidak dapat meningkatkan proporsi anggaran. Pemerintah Daerah kurang berkomitmen untuk pembangunan kesehatan. Kewenangan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan proporsi anggaran kesehatan. Kebijakan daerah dan kemampuan keuangan daerah belum berpengaruh terhadap proporsi anggaran kesehatan.

Dalam melakukan perencanaan penganggaran mengacu kepada prioritas pembangunan dan mengusulkan anggaran berdasarkan proporsi yang disepakati oleh Pimpinan Daerah. Dalam menentukan pagu anggaran mengacu kepada kebutuhan dasar manusia sehingga dapat membiayai kebutuhan per kapita masyarakat dan memperhatikan sektor-sektor yang menjadi prioritas. Peran yang besar dapat digunakan untuk meningkatkan proporsi anggaran kesehatan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sehingga dapat tetap konsisten dengan apa yang sudah menjadi komitmen terhadap sektor kesehatan.